



Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK dalam Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Syafa Kamila Ardyaputri¹, Darmeinis²
^{1,2}Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

Abstract. *This research aims to examine the role of the SIASN application in SKK services to support operational efficiency of the Directorate of Personnel Status and Position at the State Civil Service Agency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The subjects of this research are employees at the Directorate of Personnel Status and Position who are directly involved in using the SKK Services SIASN application. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by identifying patterns and themes that emerged from the data collected. The research results show that the use of the SKK Service SIASN application significantly increases operational efficiency in the Directorate of Personnel Status and Position. This application simplifies the administration process, reduces the time required to complete tasks, and increases data accuracy. Thus, the SKK Services SIASN application plays an important role in supporting more efficient and effective operations within the Directorate of Personnel Status and Position.*

Kata kunci: *SIASN SKK services, operational efficiency, State Civil Service Agency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran aplikasi SIASN dalam layanan SKK guna mendukung efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pegawai di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SIASN Layanan SKK. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIASN Layanan SKK secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Aplikasi ini mempermudah proses administrasi, mengurangi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian tugas, dan meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, aplikasi SIASN Layanan SKK berperan penting dalam mendukung operasional yang lebih efisien dan efektif di lingkungan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Kata kunci: SIASN Layanan SKK, efisiensi operasional, Badan Kepegawaian Negara.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, banyak aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan paling mencolok terlihat dalam bidang komunikasi dan informasi, yang mempermudah interaksi masyarakat. Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial di negara-negara modern. Terdapat dua variabel utama yang mempengaruhi kebutuhan layanan publik yaitu, peran negara sebagai penyedia layanan dan peran masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan demikian, pelayanan publik mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akhirnya, tekanan sosial mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja, kualitas, dan penyampaian layanan secara keseluruhan, sehingga semua pihak dapat merasakan kepuasan tanpa mengalami diskriminasi.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik diperlukan pengembangan berbasis teknologi dan informasi di bidang administrasi. Salah satu inisiatif tersebut adalah pengenalan pemerintah elektronik atau *Electronic Based Government System (EBS)*. Penerapan SPBE secara terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Indonesia telah mulai melaksanakan SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya. Menurut Bambang Dwi Anggon, Pj. Direktur Pelayanan Aptika Pemerintah, PERPRES 95/2018 tentang SPBE menandai peralihan *E-Government* menuju *I-Government (Integrated Government)*.

I-Government merupakan implementasi administrasi cerdas, dimana sistem terintegrasi saling berinteraksi dan menghasilkan data yang mendukung proses antar sistem. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan utama yaitu, mengelola kinerja instansi pemerintahan secara transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem pengawasan yang profesional dan berintegritas, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas reformasi, manajemen dan birokrasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fita Erni Yanti Telaumbanua, ditemukan bahwa penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan manajemen sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun pelaksanaan sistem ini masih terbatas pada pegawai yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai, hal ini menyoroti pentingnya kualitas dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

2. KAJIAN TEORI

Pelayanan Publik

Istilah “publik” berasal dari bahasa Inggris “*public*”, yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Kata “*public*” telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia baku sebagai “publik”, yang mengandung makna umum, orang banyak, atau ramai.

Menurut pasalog, pelayanan publik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan/atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan (pasalog, 2010:128).

Menurut Harbani Pasalong, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah orang yang dalam suatu kelompok atau satuan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik (Harbana Pasalong, 2007:128).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencakup setiap warga negara dan penduduk. Penyelenggara yang bersangkutan antara lain yaitu lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga independen yang didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik, serta badan hukum lain didirikan untuk itu.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Menyikapi pesatnya perkembangan dunia digital, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE (Presiden, 2018)

SPBE merupakan suatu kerangka yang dirancang untuk menjamin pengaturan, pengarahan dan pengendalian penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan SPBE adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang transparan, bersih, efektif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, SPBE dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keteraturan penerapan layanan E-Government oleh otoritas negara.

Pemerintah telah menetapkan kriteria penetapan SPBE berdasarkan Undang-undang Nomor 95 Tahun 2018. Prinsip tersebut terdiri dari tujuh komponen yaitu:

- a) Efektivitas, yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan.
- b) Keterpaduan, integrasi sumber daya yang mendukung SPBE
- c) Kesenambungan, pelaksanaan SPBE yang berkelanjutan dengan rencana yang jelas, tahapan yang terstruktur, dan pengelolaan perkembangan sesuai dengan kondisi yang ada.
- d) Efisiensi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE agar tepat sasaran dan efektif
- e) Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SPBE

- f) Interoperabilitas; kapasitas proses bisnis dan sistem informasi untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka pertukaran data, informasi, dan layanan SPBE.
- g) Keamanan, menjaga privasi, keaslian, konsistensi, dan aksesibilitas sumber daya pendukung SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam menciptakan sinergi yang komprehensif untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dengan kinerja tinggi. SPBE memiliki empat aspek utama sebagai sasaran utamanya, yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien
- b. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna
- c. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
- d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE

3. METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan aplikasi SIASN Layanan SKK dalam meningkatkan efisiensi operasional di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian

Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama tiga bulan yaitu, dengan fleksibilitas dalam penjadwalan wawancara dan observasi. Tempat penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di jalan Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640, Jakarta, Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama periode aktivitas kantor berlangsung secara normal, tanpa adanya gangguan signifikan atau perubahan besar dalam operasi kantor. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kompleksitas topik penelitian serta jadwal kegiatan di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Latar Penelitian

Di tengah dinamika pemerintahan dan administrasi publik yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi telah menjadi bagian integral dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian di Indonesia, memainkan

peran krusial dalam menjaga keberlangsungan serta pengembangan administrasi kepegawaian yang efisien dan transparan.

Dalam konteks tersebut, Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah diimplementasikan sebagai alat untuk mendukung berbagai layanan administrasi kepegawaian, termasuk layanan di Direktorat Status Kedudukan dan Kepegawaian. Namun, kendati keberadaannya belum jelas sejauh mana peran Aplikasi SIASN Layanan SKK dalam meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dari perspektif pegawai di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian yang memiliki tanggung jawab terhadap Aplikasi SIASN Layanan SKK di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis secara mendalam peran yang dimainkan oleh Aplikasi SIASN, khususnya dalam konteks Layanan SKK, serta bagaimana perannya dalam mendukung efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem administrasi kepegawaian di lembaga pemerintah yang lebih luas serta menyediakan panduan bagi pengembangan teknologi informasi yang lebih baik di masa depan.

Data dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2012:308), sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data dan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klarifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu:

1. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari informan yang ikut serta dalam pelaksanaan program. Data ini dikumpulkan dari subjek penelitian yang memberikan tanggapan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan data primer ini untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai peran aplikasi SIASN Layanan SKK dalam meningkatkan efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber untuk membantu dalam melakukan penelitian dan mempersiapkan karya ini. Sumber data sekunder meliputi

buku, artikel dari internet, dokumen di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, serta bahan kuliah cetak dan elektronik, yang relevan dengan penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif, yang mengharuskan pengumpulan data melalui informasi yang diperoleh dari pernyataan, pengamatan, perasaan, dan tindakan sumber data, baik dalam bentuk opini maupun fakta. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti harus menyajikan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

1. Sejarah singkat Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Selama masa kolonial, terdapat dua kelompok pegawai negeri sipil. Sebagian berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia, sementara sebagian lainnya berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Situasi ini mengakibatkan pengelolaan Pegawai Negeri dilakukan oleh dua institusi berbeda. Salah satu institusi tersebut adalah Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP), yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 pada tanggal 30 Mei 1948. Kantor tersebut berlokasi di ibukota pemerintahan Yogyakarta dan dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso yang berada di puncak. Pada tahun yang sama, pemerintah juga memutuskan untuk mendirikan kantor perwakilan KUP wilayah Indonesia Timur di Makassar.

Dalam proses perkembangannya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) menjadi pendahulu Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), sehingga tanggal 30 Mei 1948 dianggap sebagai tanggal lahir BAKN. *Dienst Voor Algemene Personele Zaken (DAPZ)*, yang dikenal sebagai Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP), didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 pada tanggal 9 Juni 1948 dan dipimpin oleh Mr. J.W Van Hoogstraten dan berkantor pusat di Jakarta. Tugas KUP adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan jabatan dan gaji pegawai negeri sipil serta menjamin terlaksananya peraturan tersebut dengan benar.

Kantor Urusan Pegawai (KUP) dipimpin oleh seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas permintaan Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Salah tindakan penting pemerintah yang signifikan pada masa itu adalah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai atau PGP-48. Dalam peraturan ini, gaji awal untuk

tingkat terendah ditetapkan sebesar Rp. 45,- per bulan. Gaji pokok seorang pegawai yang mempunyai istri dan anak minimal dari Rp. 65,- per bulan.

Prinsip evaluasi pengalaman profesional mulai diterapkan pada PGP-48 ini. Kualifikasi pendidikan dianggap tidak penting kecuali jika digunakan sebagai ukuran kemahiran atau kemampuan. Salah satu syarat terpenting untuk mengklasifikasikan karyawan adalah kemampuannya. Sistem penggajian yang digunakan dalam PGP-48 adalah sistem horizontal, dimana waktu kerja yang terikat pada gaji sebelumnya dihitung terhadap kenaikan gaji berikutnya pada pangkat baru. Skala gaji pegawai kemudian diperbaharui dengan PGPN-1955 yang mulai berlaku pada tahun 1955. Dalam PGPN-1955 ini, terdapat sembilan golongan dan 31 ruang gaji.

Selain gaji pokok, tunjangan pegawai juga ditingkatkan melalui berbagai tunjangan, antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, tunjangan umum, tunjangan perwakilan, tunjangan peninjauan dinas, pasca penyesuaian, penggantian biaya. Sejak bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu adanya penataan kembali urusan kepegawaian yang sebelumnya dikelola KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada tanggal 15 Desember 1950. Berdasarkan peraturan tersebut, KUP Yogyakarta dan DUUP Jakarta digabung menjadi satu kesatuan. Meski KUP berkantor pusat di Jakarta, namun terdapat satuan kerja daerah yang menjalankan fungsinya, yaitu Biro Administrasi Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Departemen Pensiun dan Kesejahteraan (Biro P&T) di Bandung.

Badan Kepegawaian Negara yang (BKN) bertanggung jawab kepada Presiden dan bertanggung jawab kepadanya melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan Pendayagunaan Aparatur Negara. Misi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah menjamin pengelolaan sistem kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

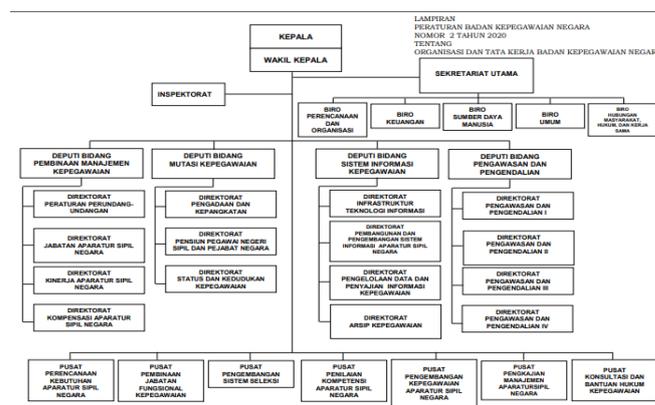
Dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan memutuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

- 2) Melaksanakan rekrutmen, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta menentukan status dan tunjangan PNS.
 - 3) Pengantar sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
 - 4) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.
 - 5) menyusun dan melaksanakan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN.
 - 6) Pendirian lembaga bantuan hukum.
 - 7) Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen.
2. Visi Badan Kepegawaian Negara
- “Mewujudkan Pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
3. Misi Badan Kepegawaian Negara

Terdapat 5 pilar misi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a) Usulan pelaksanaan manajemen ASN.
 - b) Menerapkan manajemen ASN.
 - c) menyimpan informasi tentang pegawai ASN.
 - d) Memantau dan mengendalikan norma, standar, proses, dan kriteria manajemen ASN.
 - e) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.
4. Struktur Organisasi BKN



Gambar 1. Struktur Organisasi BKN

5. Logo Badan Kepegawaian Negara (BKN)



Gambar 2. Logo BKN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2023 tentang logo Badan Kepegawaian Negara, makna dan arti logo BKN sebagai berikut:

a) Makna

Logo ini memiliki makna yang mencerminkan kecepatan, kemodernan, dan empati. Ini sejalan dengan visi dan misi BKN sebagai instansi yang menangani manajemen kepegawaian negara, yang dituntut untuk memberikan pelayanan optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

b) Arti logo

1) Lingkaran

Simbol ini merepresentasikan dinamisme, gerakan, kecepatan, siklus berulang yang berkelanjutan, serta sifat yang tidak terputus dan abadi. Tidak memiliki titik awal atau akhir, melambangkan keabadian, memiliki kualitas unggul, keandalan, kesempurnaan dan kehidupan.

2) Simbol manusia

Mencerminkan tugas BKN dalam manajemen kepegawaian negara.

3) Simbol satu titik

Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas BKN di bidang kepegawaian.

4) Simbol penghargaan

Menggambarkan pencapaian dalam memberikan layanan unggul di bidang kepegawaian, dengan tujuan mengelola aparatur sipil negara yang berprestasi dan berAKHLAK.

6. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian

Sesuai Peraturan BKN Nomor 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian bertugas mempersiapkan dan/atau menetapkan berbagai pertimbangan terkait status kepegawaian. Tugas ini juga mencakup penyiapan dan penetapan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani masalah politik dan menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Selain itu, Direktorat ini juga menangani penyelesaian masalah nomor induk pegawai, memberikan persetujuan Cuti di luar tanggungan negara, serta persetujuan perpanjangan dan pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara bagi PNS yang telah menyelesaikan masa cutinya. Tanggung jawab lainnya mencakup penyusunan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja, rekomendasi terkait kasus tewas dan cacat karena dinas, penetapan uang duka dan tunjangan cacat karena dinas, serta penetapan nama, tanggal lahir, dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Calon PNS. Selain itu, direktorat ini juga mempersiapkan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian lainnya, serta mengelola data terkait status dan kedudukan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan dan/atau menetapkan verifikasi status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta dalam politik, dan merupakan anggota/pengurus partai politik.
- b) menyiapkan dan/atau menetapkan pertimbangan status kepegawaian.
- c) menyusun dan/atau menetapkan verifikasi status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan kontrak Kerja.
- d) mengelola data tentang status dan kedudukan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan pelayanan tata usaha Direktorat.
- f) Penyiapan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada peran aplikasi SIASN Layanan SKK dalam mendukung efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Peneliti berhasil mengumpulkan data terkait tingkat efisiensi dan efektifitas operasional, teknis

pengerjaan, hambatan-hambatan yang terjadi. Temuan ini akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Mengacu pada pembahasan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I, yaitu seberapa besar kontribusi aplikasi SIASN Layanan SKK terhadap peningkatan efisiensi operasional di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, maka data dari responden sangat diperlukan. Pedoman perolehan data penelitian disusun sebagai dasar wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, transkrip hasil wawancara akan disajikan sebagai berikut :

1. Sub fokus 1

Sub fokus pertama dalam penelitian ini yaitu analisis sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK terhadap Efisiensi Operasional. Berikut adalah data yang di dapatkan pada saat pelaksanaan wawancara penelitian:

a) Bagaimana proses pengelolaan data atau informasi sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian?

Hasil wawancara saya, proses pengelolaan data atau informasi sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK yaitu :

- 1) Pengiriman berkas ke Biro Umum
 - Berkas-berkas usulan pegawai dikirim secara hard file (fisik) ke biro umum
- 2) Distribusi berkas ke Direktorat SKK
 - Biro umum mengirimkan berkas-berkas tersebut ke TU SKK
- 3) Pengelolaan berkas di bagian TU SKK
 - Bagian tata usaha (TU) SKK mencatat berkas ke dalam sistem pelacakan surat (Mail Tracking)
 - Berkas kemudian didisposisikan oleh Direktur ke sub-sub bagian yang relevan di SKK, yang terdiri dari dua sub bagian yaitu Status dan Kedudukan.
- 4) Pemeriksaan oleh konseptor
 - Konseptor di masing-masing sub bagian memeriksa dokumen yang dikirim oleh instansi.
 - Setelah pemeriksaan, konseptor membuat penetapan.
 -

5) Pengiriman ke koordinator status dan kedudukan

- Dokumen yang sudah dibuat penetapannya dikirim ke koordinator status dan kedudukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Koordinator memeriksa kelengkapan dokumen.
- Jika semua dokumen sudah lengkap dan sesuai, koordinator memberikan persetujuan (ACC).

6) Tanda tangan oleh Direktur SKK

- Dokumen yang telah disetujui oleh koordinator dikirim ke Direktur SKK untuk ditandatangani.

Sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK, proses pengelolaan berkas di Direktorat SKK melibatkan pengiriman dan pemeriksaan manual yang memerlukan banyak tahapan dan waktu. Berkas dikirim secara fisik, dicatat, diperiksa oleh beberapa pihak, dan memerlukan disposisi serta tanda tangan manual, menyebabkan efisiensi dan efektifitas kerja menjadi rendah.

b) Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan data sebelum menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK?

Hasil wawancara saya, Sebelum menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK, pengelolaan data di Direktorat SKK dihadapkan pada berbagai kendala yang signifikan. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi :

1) Proses manual dan tidak terintegrasi

Pengelolaan data pegawai dilakukan secara manual menggunakan kertas, meningkatkan risiko kesalahan input dan duplikasi data. Proses ini tidak hanya lambat tetapi juga tidak efisien.

2) Proses pengerjaan yang memakan waktu

Proses pengerjaan memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber secara manual, yang sangat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

3) Dokumentasi dan penyimpanan data

Dokumentasi fisik memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan rentan terhadap kesalahan. Proses pengarsipan dan pencarian dokumen menjadi sangat sulit dan memakan waktu.

4) Keakuratan dan keandalan data

Data yang diinput manual sering kali tidak akurat dan memerlukan pengecekan ulang. Ketidakkonsistenan dalam pencatatan data juga

menyebabkan informasi yang tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini membuat pengelolaan data menjadi tidak efisien bagi operasional di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

c) Bagaimana Pengalaman Pengguna dalam menggunakan sistem yang digunakan sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK?

Hasil wawancara saya, Sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK, pengalaman pengguna (narasumber) dalam mengelola administrasi kepegawaian di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian diwarnai dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang signifikan. Pegawai (narasumber) sering kali harus menangani proses administratif secara manual, yang melibatkan banyak dokumen kertas yang terpisah. Pengelolaan data pegawai dan informasi lainnya memakan waktu yang lama dan rentan kesalahan input serta duplikasi data.

Selain itu, penilaian kinerja pegawai tidak konsisten dan kurang transparan, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pegawai. Dukungan teknis yang terbatas untuk sistem manual membuat pemecahan masalah menjadi lebih sulit dan lambat, dan sering kali terdapat ketergantungan yang tinggi pada staf tertentu untuk mengelola data, meningkatkan risiko operasional.

Secara keseluruhan, pengguna merasa frustrasi dengan beban kerja yang tinggi dan proses yang tidak efisien, yang menyebabkan kepuasan kerja yang rendah.

d) Bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK?

Hasil wawancara saya, Sebelum implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK, tingkat efisiensi dan efektivitas di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK) sangat terbatas. Proses-proses administratif yang kritis, seperti pengelolaan data pegawai, verifikasi, dan validasi, dilakukan secara manual. koordinasi antar instansi sering kali terhambat oleh kurangnya integrasi, menyebabkan alur kerja yang tidak efisien dan informasi yang lambat.

Keakuratan data menjadi masalah utama, karena banyak data yang tidak konsisten dan memerlukan pengecekan ulang, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, keterbatasan ini mengakibatkan efisiensi yang rendah dan efektivitas yang terbatas.

2. Sub fokus 2

Sub fokus kedua pada penelitian ini yaitu analisis setelah diberlakukannya aplikasi SIASN Layanan SKK terhadap efisiensi operasional. Berikut adalah data yang di dapatkan pada saat pelaksanaan wawancara penelitian :

a) Bagaimana teknis pengerjaan aplikasi SIASN Layanan SKK?

Berdasarkan wawancara saya, teknis pengerjaan aplikasi SIASN Layanan SKK yaitu :

Fitur utama

1) Untuk instansi

a) Input data oleh data instansi

- Admin SIASN Layanan SKK di instansi menginput data terkait usulan pegawai.
- Untuk Perbaikan Nama atau Elemen NIP, pegawai memasukan data seperti ijazah, SKCP, SKPNS, SKKP terakhir, dan dokumen pendukung lainnya beserta surat pengantar dari Kepala BKD.
- Untuk Rekomendasi Kematian (Tewas), data yang dimasukkan meliputi surat dokter, surat kematian, kronologis kejadian atau visum dari kepolisian, dan surat pengantar.
- Untuk CLTN (Cutu Luar Tanggungan Negara), data yang diinput tergantung pada jenis permohonan pengajuan, perpanjangan, atau pengaktifan, sesuai dengan Peraturan No 24 Tahun 2017 tentang cara pemberian cuti.

b) Proses verifikasi

- Admin SKK mengubah data menjadi PDF dan membuat usulan untuk diverifikasi oleh atasan.
- Setelah disetujui (ACC), data otomatis masuk ke akun BKN.

2) Untuk BKN

a) Proses penerimaan dan pemeriksaan berkas

- Data yang telah di submit oleh instansi masuk ke aplikasi SIASN Layanan SK dan dashboard konseptor BKN.
- Konseptor mengecek kelengkapan berkas pegawai dan memastikan adanya surat pengantar.

- Jika berkas tidak lengkap atau ada kesalahan, data dikembalikan ke instansi dengan fitur BTL (Berkas Tidak Lengkap).
 - Jika berkas lengkap, konseptor membuat penetapan dan tembusan, yang disimpan di aplikasi SIASN Layanan SKK untuk keamanan.
- b) Proses penandatanganan dan penerbitan
- Setelah semua berkas lengkap, dilakukan pamarafan dan tanda tangan oleh atasan per wilayah
 - Dokumen kemudia diterbitkan dan proses selesai

Proses kerja

- 1) Pengumpulan data
 - Pegawai mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis usulan.
- 2) Input dan verifikasi data
 - Admin instansi menginput data ke aplikasi dan mengubahnya menjadi PDF.
 - Data diverifikasi oleh atasan dan jika disetujui, di submit ke akun BKN.
- 3) Pemeriksaan dan penyelesaian
 - Direktorat SKK menerima data, memeriksa kelengkapan dan meminta perbaikan jika perlu.
 - Setelah berkas lengkap, penetapan dibuat dan disimpan di aplikasi.
 - Dokumen ditandatangani oleh atasan dan diterbitkan.

Aplikasi SIASN Layanan SKK sangat mempermudah dan mempercepat proses administrasi kepegawaian dan mengintegrasikan input, verifikasi, dan penerbitan data secara digital, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional.

b) Apa manfaat yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK dalam pengelolaan data Direktorat Skk?

Menurut hasil wawancara saya, aplikasi SIASN Layanan SKK telah membawa berbagai manfaat penting bagi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, antara lain:

- 1) Peningkatan efisiensi
 - Proses administratif yang sebelumnya manual kini otomatis, mengurangi waktu pemrosesan dan menghilangkan kebutuhan untuk

mengelola dokumen fisik. Digitalisasi data juga mengurangi risiko kesalahan input dan duplikasi, meningkatkan akurasi dan keandalan data.

2) Kemudahan akses dan koordinasi

Pegawai dan administrator dapat mengakses data dan dokumen secara real time dari mana saja (WFH), meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Aplikasi ini juga mengintegrasikan berbagai fungsi kepegawaian, memfasilitasi koordinasi antar instansi dan mengurangi hambatan komunikasi.

3) Penyusunan laporan yang lebih cepat

Dengan data yang terpusat dan terorganisir, penyusunan laporan menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu.

4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan menjadi lebih transparan, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem. Aplikasi juga menyediakan jejak audit yang jelas, memudahkan pelacakan dan pemeriksaan historis dokumen dan keputusan.

5) Penghematan biaya dan sumber daya

Dengan berkurangnya kebutuhan akan dokumen fisik, penggunaan kertas dan biaya penyimpanan berkurang.

c) Bagaimana tingkat keefektifan dan efisiensi setelah menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK?

Berdasarkan Hasil Wawancara Saya, Setelah implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK, tingkat efisiensi dan efektivitas di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian meningkat secara signifikan. Secara efisiensi, proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang secara digital, yang mengurangi waktu pemrosesan dan menghilangkan kebutuhan untuk mengelola dokumen fisik. Digitalisasi data mengurangi risiko kesalahan input dan duplikasi, sehingga akurasi data meningkat. Pegawai (narasumber) dapat mengakses data dan dokumen secara real time dari mana saja (WFH), yang meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Proses pengerjaan menjadi lebih cepat dan efisien karena data terpusat dan terorganisir.

Secara efektivitas, Transparansi dalam proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan meningkat, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan

kepercayaan pegawai terhadap sistem. Jejak audit yang jelas memudahkan pelacakan dan pemeriksaan historis dokumen dan keputusan. Sistem keamanan yang lebih baik melindungi data digital dari risiko kehilangan atau kerusakan. Kontrol akses yang ketat memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, meningkatkan privasi dan keamanan informasi pegawai.

d) Apakah ada hambatan baru yang muncul setelah menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK, bagaimana cara mengatasinya?

Hasil dari wawancara saya, setelah penerapan aplikasi SIASN Layanan SKK, masalah teknis menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi. Gangguan teknis seperti server down dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses sementara waktu, menghambat proses kerja. Selain itu, bug pada aplikasi dapat mengganggu fungsi tertentu, sehingga mengurangi efisiensi. Masalah kompatibilitas perangkat juga dapat terjadi, di mana aplikasi mungkin tidak berjalan dengan baik pada semua jenis perangkat atau sistem operasi yang digunakan oleh pegawai.

Untuk mengatasi masalah teknis tersebut, langkah yang diambil adalah melakukan rapat dan sosialisasi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi (PPSI). Dalam rapat ini, tantangan dan hambatan teknis dibahas secara mendetail. Sosialisasi juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami masalah yang ada dan solusi yang sedang diterapkan. Melalui diskusi dan kolaborasi ini, solusi teknis yang efektif dapat ditemukan.

e) Apakah Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan aplikasi SIASN Layanan SKK?

Berdasarkan hasil wawancara saya, Di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, pelatihan formal untuk menggunakan aplikasi SIASN Layanan SKK mungkin tidak diselenggarakan secara eksplisit. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dan penyusunan prosedur dilakukan secara kolaboratif melalui rapat pembahasan internal. Pegawai di Dir SKK bersama-sama menyusun prosedur operasional bisnis (probis) yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi.

Proses ini dilakukan melalui metode coba-coba (try and error) di mana semua anggota tim berkontribusi dan belajar dari kesalahan serta perbaikan yang dihasilkan. Rapat-rapat internal diadakan secara berkala untuk membahas dan mengevaluasi probis yang telah disusun. Pada tahap awal, rapat dilakukan di

dalam lingkungan internal Dir SKK saja. Ini memungkinkan tim untuk mendiskusikan tantangan, mengevaluasi efektivitas probis, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian. Pembahasan ini disusun sesuai dengan sub fokus penelitian yang diuraikan pada Bab I, dengan rincian sebagai berikut:

A. Analisis Sebelum Adanya Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK Dalam Terhadap Efisiensi Operasional Direktorat Status Dan Kedudukan Kepegawaian.

Sebelum adanya aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) Layanan SKK proses pengerjaan di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian dikelola dengan cara manual. proses pengerjaannya itu meliputi pengumpulan berkas sesuai dengan usulan yang diinginkan seperti perbaikan nama atau elemen NIP, rekomendasi tewas, dan Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN), pengelolaan berkas usulan, Pemeriksaan atasan dan tanda tangan. Dengan menganalisis proses manual yang digunakan sebelumnya, berbagai tantangan yang mempengaruhi efisiensi operasional teridentifikasi. Berikut adalah pembahasan secara rinci mengenai temuan penelitian ini:

1. Proses manual dan keterlambatan operasional

Sebelum implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK, semua kegiatan administrasi dan pelayanan dilakukan secara manual. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang harus diselesaikan dengan interaksi langsung antar staf, penggunaan dokumen fisik, dan tanda tangan manual. kompleksitas ini menimbulkan sejumlah hambatan yang signifikan terhadap efisiensi operasional.

Setiap tahapan dalam alur kerja administrasi membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui berbagai instansi atau individu untuk verifikasi dan persetujuan. Misalnya, proses pengajuan penetapan pelayanan SKK harus melewati beberapa meja dan membutuhkan tanda tangan dari beberapa pejabat. Ketidakhadiran salah satu pejabat dapat menunda seluruh proses selama beberapa hari atau bahkan minggu. Dokumen fisik harus dikelola dan disimpan dengan hati-hati untuk menghindari kehilangan atau kerusakan. Sistem pengarsipan yang rumit dan memakan ruang penyimpanan yang besar juga memperlambat pencarian

kembali dokumen tertentu, terutama jika dokumen tersebut telah diarsipkan untuk waktu yang lama.

2. Tingginya resiko kesalahan manusia

Proses manual yang digunakan sebelum adanya aplikasi SIAASN Layanan SKK juga meningkatkan resiko kesalahan manusia (*human error*). Kesalahan ini bisa terjadi pada berbagai tahap, mulai dari pengisian data yang salah atau tidak lengkap, pencatatan data yang tidak akurat, hingga kehilangan dokumen fisik. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya memperlambat proses tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakakuratan data yang serius, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut.

Kesalahan bisa terjadi pada berbagai tahap, mulai dari pengisian data yang tidak lengkap atau salah, pencatatan data yang tidak akurat, hingga kehilangan dokumen fisik. Kesalahan semacam ini membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan untuk diperbaiki, yang akhirnya mengurangi efisiensi operasional secara keseluruhan. Tidak adanya sistem validasi otomatis berarti kesalahan-kesalahan tersebut sering kali tidak terdeteksi dan sudah terlambat, sehingga memerlukan upaya ekstra untuk koreksi dikarenakan dokumen yang berupa fisik dan konsep yang dilakukan pada saat penerimaan pelayanan di Direktorat Status dan Kedudukan yaitu *first in first out* jadi memerlukan banyak waktu untuk mengoreksi.

3. Keterbatasan dalam monitoring dan pelacakan

Salah satu tantangan terbesar dalam proses manual adalah keterbatasan dalam monitoring dan pelacakan status dokumen. Karena dokumen diproses secara fisik dan sering kali berpindah-pindah antara berbagai departemen atau individu, sulit untuk melacak status terkini dari setiap dokumen. Tidak adanya sistem pelacakan yang terpusat membuat para pegawai kesulitan dalam memantau kemajuan tugas dan mengidentifikasi *bottleneck* atau titik-titik kemacetan dalam proses.

Keterbatasan membuat para pegawai Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK) sering kali tidak memiliki visibilitas yang cukup untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional dengan cepat. Akibatnya, penundaan dalam penyelesaian tugas menjadi hal biasa, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan pegawai dan pihak-pihak terkait lainnya yang menggunakan layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK). Contohnya jika seorang pegawai ingin mengetahui status permohonan SKK-nya, ia harus menghubungi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK) secara

langsung untuk mendapatkan informasi, yang memakan waktu dan mengurangi produktivitas.

4. Tantangan dalam penyimpanan dan pengarsipan dokumen

Sistem pengarsipan dokumen fisik yang digunakan implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan manajemen yang teliti. Dokumen harus disimpan hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kehilangan, dan pencarian kembali dokumen tertentu bisa memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, pengarsipan dokumen dalam bentuk fisik juga rentan terhadap resiko kebakaran atau bencana lainnya yang dapat merusak atau menghancurkan dokumen tersebut.

Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, akses cepat ke dokumen penting menjadi sangat sulit jika semua dokumen disimpan dalam bentuk fisik. Hal ini menambah kompleksitas dalam manajemen resiko dan pemulihan bencana yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi operasional secara keseluruhan.

5. Dampak terhadap efisiensi dan produktivitas

Sebelum adanya implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK). Waktu yang dihabiskan untuk memproses dokumen secara manual mengurangi waktu yang tersedia untuk tugas-tugas lain dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pegawai di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK). Para pegawai sering kali terjebak dalam tugas-tugas administratif yang berulang dan memakan waktu yang banyak, sehingga memiliki lebih sedikit waktu untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih produktif atau inovatif.

Dari hasil analisis penelitian saya berikut adalah tabel waktu pemrosesan dokumen sebelum implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK beserta penjelasannya:

**Tabel 1. Waktu Pemrosesan Dokumen sebelum implementasi aplikasi SIAN
Layanan SKK**

Tahapan Proses	Rata-Rata Waktu Pemrosesan
1. Penerimaan dan Pengumpulan Berkas	1-2 hari
2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen	1-2 hari
3. Pemeriksaan dan Validasi Dokumen	1-2 hari
4. Pengolahan Data dan Penyusunan Surat keputusan SKK	1-3 hari
5. Persetujuan dan Penandatanganan	1-3 hari
6. Pengarsipan dan Pengiriman Dokumen	1-2 hari
Total Waktu Pemrosesan	3-5 hari

Penjelasan tahapan proses:

a) Penerimaan dan pengumpulan berkas

Pada tahap ini, dokumen-dokumen yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu dari individu maupun unit kerja terkait. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 hari karena memerlukan koordinasi dan pengumpulan fisik dokumen.

b) Verifikasi kelengkapan dokumen

Setelah dokumen terkumpul, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen yang terlewat atau informasi yang kurang. Tahap ini memerlukan waktu sekitar 1-2 hari.

c) Pemeriksaan data dan validasi dokumen

Dokumen-dokumen yang sudah lengkap kemudian diperiksa dan divalidasi lebih lanjut untuk memastikan keaslian dan keakuratan informasi yang tercantum. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 hari, tergantung pada kompleksitas dokumen.

d) Pengolahan data dan penyusunan Surat keputusan SKK

Data dari dokumen yang telah diverifikasi dan divalidasi diolah untuk menyusun Surat keputusan. Proses pengolahan data dan penyusunan ini memerlukan waktu sekitar 1-3 hari.

e) Persetujuan dan penandatanganan

Surat keputusan SKK yang telah disusun kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari pihak berwenang. Proses ini

bisa memakan waktu 1-3 hari, tergantung pada ketersediaan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen.

f) Pengarsipan dan pengiriman Surat keputusan SKK

Setelah surat keputusan SKK disetujui dan ditandatangani, dokumen tersebut diarsipkan dan dikirim kepada pihak yang membutuhkan. Tahap ini biasanya memakan waktu 1-2 hari.

Total waktu pemrosesan dokumen sebelum implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK berkisar antara 3-5 hari, dengan setiap tahapannya memiliki rentang waktu tertentu yang dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti volume dokumen dan efisiensi proses internal.

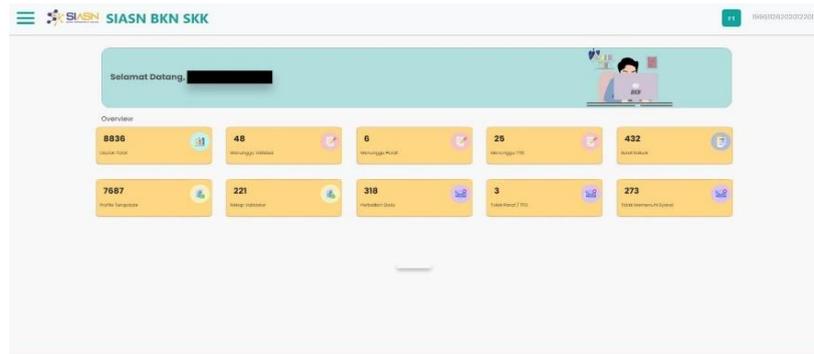
B. Analisis Setelah Diberlakukannya Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK Terhadap Efisiensi Operasional.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 48 huruf d jelas disebutkan bahwa BKN bertugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN), didukung sistem informasi kepegawaian yang komprehensif. Maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) membangun aplikasi SIASN. Aplikasi SIASN merupakan pembaruan dari aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Saat ini aplikasi SAPK telah diperbarui dengan penambahan beberapa fitur baru menjadi aplikasi SIASN.

Dalam aplikasi SIASN, memiliki peran dalam pelayanan Status dan Kedudukan Kepegawaian (SKK), yang sekarang disebut sebagai SIASN Layanan SKK. Aplikasi ini suatu produk percepatan yang mengubah manual menjadi digital. Aplikasi ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah rekomendasi tewas, perbaikan nama dan elemen NIP, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).



Gambar 3. Aplikasi SIASN Layanan SKK



Gambar 4. Halaman Utama SIASN Layanan SKK

Setelah implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) mengalami sejumlah perubahan signifikan yang berdampak positif terhadap efisiensi operasionalnya. Penelitian ini menngungkapkan berbagai aspek yang menunjukkan peningkatan efisiensi. Mulai dari pengurangan waktu pemrosesan dokumen, penurunan resiko kesalahan, ada peningkatan kemampuan monitoring dan pelacakan. Berikut adalah pembahasan secara rinci mengenai temuan penelitian ini:

1. Pengurangan waktu pemrosesan dokumen

Salah satu temuan penelitian ini adalah pengurangan drastis waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen. Sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK, setiap tahap dalam alur kerja administrasi dan pelayanan membutuhkan waktu yang lama karena dilakukan secara manual. Namun, setelah implementasi aplikasi ini, banyak proses sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau hari.

Dari hasil analisis penelitian saya berikut adalah tabel waktu pemrosesan dokumen sesudah implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK beserta penjelasannya:

Tabel 2. Waktu Pemrosesan Dokumen setelah implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK

Tahapan Proses	Rata-Rata Waktu Pemrosesan
1. Penerimaan dan Pengumpulan Berkas	0,5-1 hari
2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen	0,5-1 hari
3. Pemeriksaan dan Validasi Dokumen	0,5-1 hari
4. Pengolahan Data dan Penyusunan Surat keputusan SKK	0,5-1 hari
5. Persetujuan dan Penandatanganan	1-2 hari
6. Pengarsipan dan Pengiriman Dokumen	0,5-1 hari
Total Waktu Pemrosesan	1-3 hari

Penjelasan tahapan proses:

a) Penerimaan dan pengumpulan berkas

Dokumen yang diterima dan dikumpulkan melalui sistem digital jadi mempermudah dan mempercepat proses penerimaan. Tahap ini hanya memerlukan 0,5-1 hari.

b) Verifikasi kelengkapan dokumen

Pada tahap ini proses pemeriksaan kelengkapan dokumen tetap dilakukan secara manual tetapi sudah dalam sistem digital jadi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk verifikasi manual. Tahap ini hanya memerlukan 0,5-1 hari.

c) Pemeriksaan dan validasi dokumen

Proses pemeriksaan dan validasi dilakukan secara elektronik, mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Proses ini biasanya memakan waktu 0,5-1 hari.

d) Pengolahan data dan penyusunan Surat keputusan SKK

Data yang diolah disusun secara otomatis oleh sistem dan para pegawai bisa (*Work From Home*) WFH, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pemrosesan. Proses ini memerlukan 0,5-1 hari.

e) Persetujuan dan penandatanganan

Surat keputusan SKK diajukan untuk persetujuan dan tanda tangan digital, mempercepat proses dibandingkan dengan persetujuan manual. tahap ini memakan waktu 1-2 hari.

f) Pengarsipan dan pengiriman Surat keputusan SKK

Surat keputusan SKK diarsipkan secara digital yaitu di loker SKK dan tanda tangan dilakukan secara digital, mempercepat proses dibandingkan dengan persetujuan manual. Proses ini memerlukan 0,5-1 hari.

Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses pemrosesan dokumen setelah implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK adalah antara 1-3 hari. Implementasi aplikasi ini secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan dalam setiap tahapan proses.

2. Penurunan resiko kesalahan manusia

Temuan lain yang signifikan adalah penurunan resiko kesalahan manusia (*human error*). Aplikasi SIASN Layanan SKK dilengkapi dengan fitur validasi data

yang memastikan bahwa dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem adalah lengkap dan akurat. Hal ini sangat berbeda dengan metode manual, di mana kesalahan pengisian data atau pencatatan sering kali terjadi dan memerlukan waktu tambahan untuk diperbaiki.

Sebagai contoh dari hasil analisis penelitian saya, dalam pengisian data pegawai untuk permohonan SKK, sistem otomatis akan memeriksa kelengkapan dan konsistensi data. Jika ada kesalahan atau kekurangan, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna untuk memperbaikinya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini tidak hanya mengurangi kesalahan, tetapi juga mempercepat proses keseluruhan karena mengurangi kebutuhan untuk revisi dan koreksi.

3. Peningkatan kemampuan monitoring dan pelacakan

Sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK, salah satu tantangan yang sudah saya bahas di sub fokus 1 adalah keterbatasan monitoring dan pelacakan status dokumen. Dengan implementasi aplikasi ini, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) kini memiliki kemampuan untuk memantau status setiap dokumen secara real-time. Konseptor dapat dengan mudah mengetahui di mana posisi dokumen dalam alur kerja, siapa yang bertanggung jawab pada tahap tertentu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap.

No	Nama HP	Tgl Diinput	Tgl SKP/Perse	Jenis	Lokasi	Status Dokumen	Aksi
1	[Redacted]	01 Nov 2022	01 Nov 2022	Pemeriksaan Tgl. Berlanggung	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
2	[Redacted]	09 Dec 2022	09 Dec 2022	Pemeriksaan Tgl. Berlanggung	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
3	[Redacted]	10 Jul 2022	01 Aug 2022	Pemeriksaan Proses Awal (PWA)	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
4	[Redacted]	08 Nov 2022	08 Nov 2022	Pemeriksaan Proses Awal (PWA)	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
5	[Redacted]	10 Feb 2022	10 Feb 2022	Pemeriksaan Tgl. Berlanggung dan Tgl. Asal (PWA)	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
6	[Redacted]	20 Jul 2022	20 Sep 2022	Pemeriksaan Tgl. Berlanggung	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
7	[Redacted]	07 Dec 2022	07 Dec 2022	Pemeriksaan Tgl. Berlanggung	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
8	[Redacted]	19 Jul 2022	07 Aug 2022	Pemeriksaan Proses Awal (PWA)	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
9	[Redacted]	11 Jun 2024	11 Jun 2024	Pemeriksaan Proses Awal (PWA)	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]
10	[Redacted]	08 Feb 2022		Pemeriksaan Berlanggung	[Pemeriksaan]	[Pemeriksaan]	[Detail]

Gambar 5. Halaman Monitoring Progress di Aplikasi SIASN Layanan SKK

Aplikasi ini menyediakan dashboard yang interaktif dan laporan yang terperinci, memungkinkan konseptor untuk Mengidentifikasi *bottleneck* atau titik-titik kemacetan dalam proses dengan cepat. Dengan informasi ini, manajemen dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan

efisiensi operasional. Selain itu, transparansi ini juga meningkatkan akuntabilitas, karena setiap langkah dalam proses dapat dilacak dan diaudit.

4. Peningkatan produktivitas pegawai

Peningkatan efisiensi operasional tidak hanya mengurangi waktu pemrosesan dokumen tetapi juga berdampak positif pada produktivitas pegawai. Sebelum adanya aplikasi SIASN Layanan SKK, banyak waktu pegawai yang terbuang untuk tugas-tugas administratif yang berulang dan memakan waktu. Setelah penerapan aplikasi ini, banyak tugas telah diotomatisasi, sehingga memungkinkan pegawai untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang bersifat strategis dan memberikan nilai tambah.

Sebagai contoh dari hasil analisis penelitian saya, dengan berkurangnya waktu dihabiskan untuk mencari dan mengelola dokumen fisik, pegawai bisa melakukan WFH (*Work From Home*). Pegawai dapat mengalokasikan banyak waktu untuk kegiatan seperti pengembangan kebijakan, peningkatan layanan dan pelatihan pegawai. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja departemen secara keseluruhan.

5. Kepuasan pegawai dan *stakeholder*

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK meningkatkan tingkat kepuasan pegawai dan *stakeholder* lainnya. Pengurangan waktu tunggu, peningkatan akurasi data, dan kemampuan untuk melacak status dokumen secara real-time membuat proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih efisien dan transparan. Pegawai merasa lebih dihargai dan didukung dalam pekerjaan mereka karena mereka tidak lagi harus berurusan dengan banyaknya hambatan administratif yang sebelumnya ada.

Stakeholder eksternal, seperti penerima layanan, juga menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Mereka merasakan manfaat dari proses yang lebih cepat dan responsif. Dalam beberapa kasus, ini juga meningkatkan citra dan reputasi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) sebagai departemen yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

6. Efektivitas pengambilan keputusan

Implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK juga berdampak positif pada efektivitas pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan data yang lebih akurat, konseptor memperoleh akses informasi yang lebih komprehensif

dan mutakhir. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta.

Sebagai contoh dari hasil analisis penelitian saya, data yang dihasilkan oleh aplikasi dapat digunakan untuk menganalisis tren, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan merencanakan strategi jangka panjang. Informasi yang sebelumnya sulit atau memakan waktu diperoleh sekarang tersedia dengan cepat dan mudah, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif.

7. Tantangan dan solusi dalam implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK

Meskipun aplikasi SIASN Layanan SKK memberikan banyak manfaat, implementasi nya juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan ini termasuk kesiapan teknologi, pelatihan pegawai, dan integrasi data. masalah teknis menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi. Gangguan teknis seperti server down dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses sementara waktu, menghambat proses kerja.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini adalah melakukan rapat dan sosialisasi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi (PPSI). Dalam rapat ini, tantangan dan hambatan teknis dibahas secara mendetail. Sosialisasi juga dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami masalah yang ada dan solusi yang sedang diterapkan dan memastikan bahwa data yang diinput ke dalam aplikasi SIASN Layanan SKK adalah akurat dan konsisten.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada evaluasi peran aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK dalam meningkatkan efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (DIR SKK) di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses administrasi terkait pengelolaan layanan SKK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIASN Layanan SKK telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek efisiensi operasional. Berikut adalah kesimpulan rincian dari penelitian berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah peningkatan signifikan dalam kecepatan proses administrasi setelah penerapan aplikasi SIASN Layanan SKK. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pengajuan dan pengesahan surat keputusan SKK dilakukan secara

manual, yang sering kali memakan waktu sehari-hari hingga berminggu-minggu karena harus melalui berbagai tahap pemeriksaan dan persetujuan. Dengan aplikasi SIASN Layanan SKK, seluruh proses ini dapat dilakukan secara digital dan otomatis. Pegawai dapat mengajukan permohonan surat keputusan SKK secara online dan sistem akan melakukan verifikasi dan validasi secara otomatis. Ini mengurangi waktu pemrosesan menjadi hanya beberapa jam atau hari, tergantung pada kompleksitas permohonan.

Peningkatan kecepatan ini tidak hanya menguntungkan pegawai yang menggunakan layanan SKK, tetapi juga meningkatkan produktivitas pegawai di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK). Mereka dapat menangani lebih banyak usulan dalam waktu yang lebih singkat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) secara keseluruhan.

Implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK juga berdampak positif pada akurasi dan konsistensi data. Dalam proses manual, kesalahan manusia seperti kesalahan pengisian data dan pencatatan yang tidak akurat sering kali tidak terindarkan. Aplikasi SIASN Layanan SKK dilengkapi dengan fitur validasi data yang memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan. Hal ini mengurangi kesalahan dalam pengisian data, sehingga meningkatkan akurasi dan konsistensi data yang tersimpan dalam sistem. Dengan data yang lebih akurat dan konsisten, konseptor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data.

Meskipun aplikasi SIASN Layanan SKK memberikan banyak manfaat, implementasi juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yaitu gangguan teknis seperti server down dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses sementara waktu, tetapi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) bisa mengatasi tantangan tersebut yaitu bekerja sama dengan Tim Pengelola Sistem Informasi (PPSI).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIASN Layanan SKK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK). Peningkatan kecepatan proses administrasi, penurunan kesalahan manusia (*human error*), Peningkatan kemampuan monitoring dan pelacakan, peningkatan produktivitas pegawai, kepuasan pegawai dan *stakeholders*, efektivitas pengambilan keputusan adalah beberapa manfaat utama yang diperoleh. Dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, aplikasi SIASN Layanan SKK memiliki potensi besar untuk terus membawa perubahan positif dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung transformasi digital di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan "Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK Dalam Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN)" memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen kepegawaian.

Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya adopsi teknologi dalam administrasi publik, terutama dalam konteks manajemen kepegawaian yang seringkali kompleks dan membutuhkan akurasi tinggi. Aplikasi SIASN Layanan SKK berhasil mengoptimalkan proses administrasi kepegawaian dengan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja manual tetapi juga meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data pegawai. Namun, meskipun penelitian ini telah memberikan hasil yang positif, ada beberapa alasan yang sangat mendesak untuk melakukan penelitian lanjutan yaitu:

1. Teknologi informasi adalah bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang. Inovasi baru dalam teknologi informasi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja aplikasi SIASN layanan SKK lebih lanjut. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana inovasi terbaru dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada, sehingga aplikasi SIASN Layanan SKK tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang.
2. Penelitian lanjutan penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari implementasi aplikasi SIASN Layanan SKK. Penelitian awal mungkin hanya memberikan gambaran tentang manfaat langsung dari penggunaan aplikasi ini. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aplikasi ini mempengaruhi efisiensi operasional dan kepuasan pegawai dalam jangka panjang, diperlukan studi yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat mengungkapkan tantangan yang mungkin muncul seiring waktu dan memberikan rekomendasi tentang cara mengatasi tantangan tersebut.
3. Selain itu, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji bagaimana aplikasi SIASN Layanan SKK berinteraksi dengan berbagai kelompok pengguna. Pegawai dengan latar belakang yang berbeda mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam menggunakan aplikasi ini. Analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jabatan, dan lokasi geografis mempengaruhi penggunaan aplikasi SIASN Layanan SKK dapat memberikan wawasan berharga

tentang cara meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas aplikasi ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat membantu memastikan bahwa aplikasi SIASN Layanan SKK dapat digunakan secara efektif oleh seluruh pegawai tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, penelitian tentang peran aplikasi SIASN Layanan SKK dalam mendukung efisiensi operasional di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja administrasi publik. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini, diperlukan penelitian lanjutan yang komprehensif dan implementasi temuan penelitian yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (Dir SKK) dapat terus meningkatkan efisiensi operasionalnya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.

REFERENSI

- Agung Wijoyo, S.kom, D. I. (2023). Pengaruh sistem informasi terhadap efisiensi operasional perusahaan. 8.
- Badan Kepegawaian Negara. (2020, Desember 30). Organisasi dan tata kelola Badan Kepegawaian Negara. <https://www.bkn.go.id/unggahan/2021/01/PERBKN-NO-29-TAHUN-2020.pdf>
- Badan Kepegawaian Negara. (2021, Februari 10). Direktur status & kedudukan kepegawaian. <https://www.bkn.go.id/pejabat-pimpinan/direktur-status-kedudukan-kepegawaian/>
- Badan Kepegawaian Negara. (2023, September 26). Sistem informasi aparatur sipil negara. <https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/10/PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN.pdf>
- Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. (2023). Pemanfaatan aplikasi SIASN untuk rekomendasi penetapan tewas. Badan Kepegawaian Negara.
- Fita Erni Yanti Telaumbanua, D. L. (2022). Penerapan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. 7.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2009, Juli 18). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. <https://jdih.n.go.id/files/4/2009uu025.pdf>
- Kristiana, A. P. (2023). Teknik focus group discussion dalam penelitian kualitatif. 11.
- Mariano, S. (2021). Penerapan e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. 16.